



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2026


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperoleh informasi kinerja dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan, guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026;

Mengingat 

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135);

sebagaimana 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 005);

7. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 003);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2026.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
5. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
6. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

7. Indikator 

7. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
8. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat yang diemban.
9. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 2 (dua) tahun yang digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 2 (dua) tahun dari Tahun 2025-2026.
11. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun.
12. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Perangkat Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari:
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ⁴tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bab III. ⁹

BAB III
PENGUNAAN IKU
Pasal 4

IKU digunakan Pemerintah Daerah untuk :

- a. Perencanaan Jangka Menengah;
- b. Perencanaan Tahunan;
- c. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- e. Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah; dan
- f. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Pasal 5

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana termuat dalam dokumen RPD dan Renstra Perangkat Daerah dapat diukur melalui pencapaian IKU.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah melakukan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU guna melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala dengan mencermati kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

BAB IV

PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan pelaksanaan IKU.
- (2) Pembinaan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan akuntabilitas kinerja.
- (3) Hasil pembinaan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Pasal 8

Koordinasi pengintegrasian IKU ke dalam Sistem Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi capaian program serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan.

Pasal 9

- (1) Monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan IKU dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan.
- (2) Hasil monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan acuan dalam menyusun laporan pelaksanaan SAKIP oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan akuntabilitas kinerja

BAB V

PENUTUP

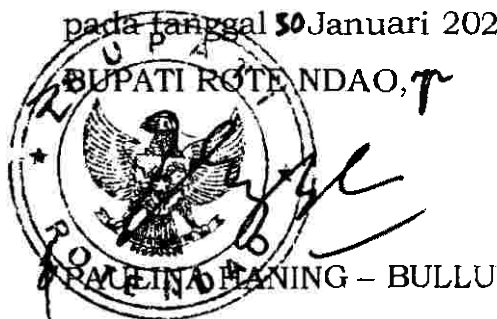
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

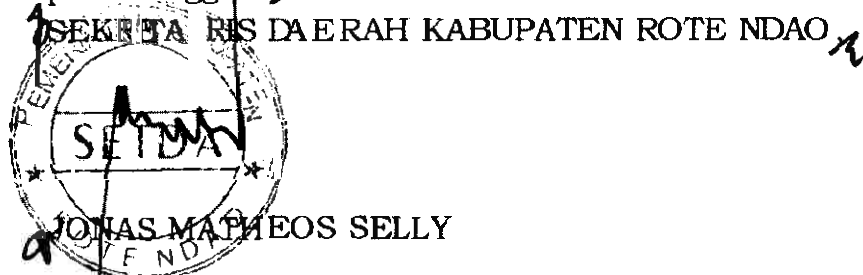
Ditetapkan di Baa

pada tanggal 30 Januari 2024



Diundangkan di Ba'a

pada tanggal 30 Januari 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024 NOMOR 005

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 5 TAHUN 2024

TANGGAL : 30 JANUARI 2024

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	Indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Badan Pusat Statistik
		Meningkatnya kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	Mengukur nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Stunting	%	Total Balita Stunting/Total Balita di ukur X 100	Dinas Kesehatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarus-utamaan gender	Laju pertumbuhan penduduk (%)	%	Angka yang menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badan Pusat Statistik
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	Indeks yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG dibentuk oleh 3 dimensi yaitu keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Badan Pusat Statistik
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	%	Jumlah penduduk miskin/Jumlah populasi penduduk X 100	Seluruh Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Pusat Statistik
		PDRB Per Kapita ADHB	Rp	Nilai PDB atau PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu Atas Dasar Harga Berlaku	Seluruh Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Pusat Statistik
	Meningkatnya kesempatan kerja dan kesejahteraan sosial masyarakat	Tingkat pengangguran terbuka	%	Jumlah pengangguran / Jumlah angkatan kerja x 100	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Persentase PMKS Mandiri	%	Jumlah Keluarga DTKS PMKS/Total Keluarga DTKS x 100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Meningkatnya ekonomi unggulan daerah	Pertumbuhan ekonomi	%	Perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Pusat Statistik	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Pusat Statistik

9

NO	TUJUAN/BASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya nilai investasi dan pendapatan asli daerah	Realisasi investasi daerah	Miliar Rp	Jumlah nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	Jumlah PAD/Jumlah Pendapatan Daerah X 100	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks kualitas infrastruktur	%	IKI = (20% x Jalan) + (20% x Irigasi) + (20% x Perumahan) + (20% x Sanitasi) + (20% x Air Bersih)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	IKLH = (0,376 x Indeks Kualitas Air) + (0,405 x Indeks Kualitas Udara) + (0,219 x Indeks Kualitas Lahan)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	Jumlah Panjang jalan kabupaten kondisi baik/Total panjang jalan kabupaten terbangun x 100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase luas daerah yang terlayani oleh jaringan irigasi	%	Luas areal yang terlayani irigasi / total luas areal yang harus terlayani irigasi x 100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pertanian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pertanian
		Persentase perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	%	Jumlah rumah tidak layak huni yang dibangun / Total rumah tidak layak huni x 100	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Meningkatnya pengendalian dampak lingkungan dan pemanfaatan ruang	Persentase Pengelolaan Sampah	%	Jumlah sampah tertangani / Total timbunan Sampah x 100	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Air	Poin	Survei kualitas air secara umum dengan menggunakan sekelompok parameter	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	Realisasi RTRW /Rencana peruntukan x 100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	Hasil evaluasi Kemen PAN RB	Inspektorat Badan Kepegawaian, Pendidikan, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia Daerah Bagian Organisasi	Inspektorat
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	Rata-rata nilai 9 unsur penilaian survei kepuasan masyarakat pada pemerintah daerah	Perangkat daerah pelayanan publik	Bagian Organisasi
	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP)	Predikat	Nilai SAKIP daerah	Seluruh Perangkat Daerah	Bagian Organisasi
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah pemerintah daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Predikat	Penilaian Kemendagri	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif didukung oleh teknologi dan informasi	Indeks Inovasi Daerah	Skor	Himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Seluruh Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Skor	Evaluasi tingkat kematangan Pelaksanaan SPBE (Permenpan RB nomor 5 tahun 2018)	Semua Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan	Semua Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia Daerah
	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban serta ketahanan bencana	Angka kriminalitas	Kasus	Jumlah kriminalitas yang terjadi	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
Indeks Resiko Bencana		Poin	Penilaian kapasitas yang dicerminkan oleh Indikator Ketahanan Daerah dari seluruh stakeholder penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Indeks Desa Membangun		Poin	Indeks komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 5 TAHUN 2024

TANGGAL : 30 JANUARI 2024

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN ROTE NDAO

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
	Meningkatnya kualitas pendidikan	Harapan lama sekolah	Tahun	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Meningkatnya akses layanan pendidikan masyarakat	Persentase penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	Jumlah siswa PAUD usia 5-6 tahun/Total jumlah anak usia 5-6 tahun x 100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Angka partisipasi kasar	%	Jumlah murid SD atau Sederajat dan SMP atau Sederajat / Jumlah penduduk usia 7-15 tahun x 100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Angka partisipasi murni	%	Rata-rata Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/ Paket A dan Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	Jumlah siswa SD dan SMP usia 7-15 tahun /Total jumlah penduduk usia 7-15 tahun x 100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	Jumlah siswa pendidikan kesetaraan usia 7-18 tahun/Total jumlah penduduk usia 7-18 tahun x 100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Angka putus sekolah	Orang	Jumlah angka putus sekolah (APS) SD/ MI dan SMP/ MTs	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

9

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
		Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (/10.000)	%	Jumlah guru (SD/MI +SMP/MTs) / Jumlah murid (SD/MI+SMP/MTs) x 100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	Jumlah capaian kinerja penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf se-Kabupaten dan Kota / Jumlah Seluruh Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf se-Kabupaten dan Kota x 100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV / Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs x 100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Meningkatnya prestasi olahraga dan peran serta kepemudaan dalam pembangunan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan yang aktif	%	Jumlah partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan yang aktif / Jumlah seluruh pemuda dalam organisasi kepemudaan yang aktif x 100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase atlit yang mendapatkan medali dalam Kejurprov/Kejurda	%	Jumlah atlit yang mendapatkan medali dalam Kejurprov/Kejurda / Jumlah seluruh atlit yang mengikuti Kejurprov/Kejurda x 100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	DINAS KESEHATAN					
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Prevalensi stunting	%	Jumlah Balita Stunting / Jumlah Balita ditimbang x 100	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	Kasus kematian ibu	Kasus	Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas pada kurun waktu tertentu	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Kasus kematian bayi	Kasus	Jumlah kematian bayi yang terjadi pada bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal) pada kurun waktu tertentu	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Kasus kematian balita	Kasus	Jumlah kematian bayi yang terjadi pada bayi usia 0-59 bulan (termasuk neonatal) pada kurun waktu tertentu	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Prevalensi balita gizi buruk	%	Jumlah balita gizi buruk / Jumlah balita ditimbang x 100	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Prevalensi balita gizi kurang	%	Jumlah balita gizi kurang / Jumlah balita ditimbang x 100	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase puskesmas terakreditasi paripurna	%	Jumlah puskesmas terakreditasi paripurna / Jumlah puskesmas yang disurvei x 100	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Persentase rumah sakit terakreditasi paripurna	%	Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna / Jumlah Rumah Sakit yang disurvei x 100	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase Succes Rate Tuberculosis	%	Jumlah kasus penderita TBC yang sembuh / Jumlah pengobatan lengkap kasus TBC x 100	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Prevalensi HIV/AIDS	Per 1.000 penduduk	Jumlah Orang yang positif HIV/AIDS / Jumlah Penduduk x 1000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
	Meningkatnya Konektivitas	Persentase jalan kabupaten kondisi baik	%	Jumlah Panjang jalan kabupaten kondisi baik/Total panjang jalan kabupaten terbangun x 100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya infrastruktur jalan antar wilayah	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	%	Jumlah panjang jalan kabupaten kondisi sedang dan baik /Total panjang jalan kabupaten terbangun kabupaten x 100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase jalan strategis desa terbangun	%	Jumlah panjang jalan strategis desa terbangun /Total panjang jalan strategis desa x 100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya air	Persentase luas daerah yang terlayani oleh jaringan irigasi	%	Luas areal yang terlayani irigasi / total luas areal yang harus terlayani irigasi x 100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	Panjang irigasi kabupaten dalam kondisi baik / Total panjang irigasi kabupaten terbangun x 100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan bersanitasi dan air minum layak	Persentase rumah tangga bersanitasi dan memiliki air minum layak	%	Jumlah rumah tangga berakses sanitasi dan air minum layak /Jumlah seluruh rumah tangga x 100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air limbah dan air minum	Persentase rumah tangga bersanitasi layak	%	Jumlah rumah tangga yang berakses sanitasi layak/Total rumah tangga x 100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase rumah tangga berakses air minum layak	%	Jumlah rumah tangga yang berakses air minum layak /Total rumah tangga x 100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

g

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%	Realisasi RTRW/Rencana peruntukan x 100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase pemanfaatan ruang wilayah perkotaan	%	Luas wilayah termanfaat perkotaan RDTR/Total luas wilayah perkotaan RDTR x 100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP					
	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman layak	%	$(60\% \times \% \text{RLH Tahun N}) + (14\% \times \% \text{Sanitasi Layak Tahun N}) + (26\% \times \% \text{Air Minum Layak Tahun N})$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat	Persentase rumah tidak layak huni terbangun	%	Jumlah rumah tidak layak huni yang dibangun / Total RTLH x 100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Meningkatnya pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	$IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Terjaganya kualitas air sesuai standar baku mutu lingkungan	Indeks kualitas Air (IKA)	Poin	Survei kualitas air secara umum dengan menggunakan sekelompok parameter	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Meningkatnya penanganan sampah	Persentase penanganan sampah Kota Ba'a	%	Jumlah sampah tertangani / Total timbunan Sampah x 100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Angka kriminalitas	Kasus	Jumlah kejadian kriminalitas yang terjadi dalam satu tahun	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perda	%	Jumlah kasus yang ditangani / Jumlah kasus yang dilaporkan x 100	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
		Persentase gangguan tantribun dan perlindungan masyarakat yang diselesaikan	%	Pelanggaran K3 yang terselesaikan / Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP x 100	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	%	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit / Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK x 100	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					
	Terwujudnya kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	Persentase desa tangguh bencana	%	Jumlah desa tangguh bencana / Total seluruh desa x 100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen dan Penanganan Bencana	Persentase penanganan pra bencana	%	Jumlah penanganan pra bencana / Jumlah Total penanganan pra bencana yang direncanakan x 100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	Jumlah penanganan tanggap darurat bencana / Jumlah Bencana x 100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase penanganan pasca bencana	%	Jumlah penanganan pasca bencana / Jumlah Total penanganan pasca bencana yang direncanakan x 100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	DINAS SOSIAL					
	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase PMKS Mandiri	%	Jumlah Keluarga DTKS PMKS/Total Keluarga DTKS x 100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Meningkatnya jaminan sosial terhadap fakir miskin	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Mandiri	%	Jumlah KPM Mandiri/Total PKH x 100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
8	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA					
	Meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan ketenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	Persentase banyaknya angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya Ketrampilan /Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja lokal yang terampil dan produktif (bersertifikat)	%	Tenaga kerja lokal yang bersertifikat / Jumlah tenaga kerja lokal yang terdata x 100	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis antara Pekerja dan Pengusaha	Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	%	Jumlah kasus yang diselesaikan / Jumlah kasus yang terdaftar x 100	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Terwujudnya Transmigran yang mandiri	Persentase Transmigran yang mandiri	%	Jumlah transmigran yang mandiri /Jumlah transmigran x 100	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Meningkatnya pembinaan Transmigran lokal	Persentase Transmigran lokal yang dibina	%	Jumlah transmigran lokal yang dibina / Jumlah transmigran lokal x 100	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB					
	Mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	Indikator yang menggambarkan rasio capaian antara IPM Perempuan dan IPM Laki-Laki	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB
	Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah / Jumlah pekerja perempuan x 100	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	Indeks yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG dibentuk oleh 3 dimensi yaitu keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB
	Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	%	Angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB
	Terwujudnya pengendalian penduduk	Total fertility rate (TFR) / Angka Kelahiran Total	%	Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan KB, ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi serta mengendalikan angka kelahiran	Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	%	Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB / Jumlah semua perangkat daerah x 100	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB
		Rasio akseptor KB	%	Jumlah Akseptor KB / Jumlah pasangan usia subur x 100	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB
		Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49	%	Jumlah peserta KB aktif / Jumlah pasangan usia subur x 100	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB
		Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (AFR 15-19)	%	Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19 / Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 pada pertengahan tahun yang sama x 100	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani / Jumlah pasangan usia subur x 100	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB
	Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak	Rasio KDRT	%	Jumlah KDRT / Jumlah rumah tangga x 100	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB
Terwujudnya perlindungan perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum / Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum x 100	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB	
	Cakupan layanan pemulangan bagi anak perempuan dan anak korban kekerasan	%	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan / Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT x 100	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB	
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Poin	Rata-rata nilai 9 unsur penilaian survei kepuasan masyarakat pada pelayanan kependudukan dan catatan sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak 0-17 tahun	%	Jumlah anak 0-17 tahun berakte kelahiran / Total Jumlah anak 0-17 tahun x 100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase pasangan berakte nikah	%	Jumlah pasangan nikah berakte nikah / Jumlah keseluruhan pasangan nikah x 100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan / Jumlah penduduk wajib KTP x 100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase Desa Maju dan Berkembang	%	Jumlah Desa Maju + Desa Berkembang / Jumlah Total Desa x 100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Terwujudnya Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) aktif	%	Jumlah PKK Aktif / Jumlah PKK x 100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase posyandu aktif	%	Jumlah Posyandu Aktif / Jumlah Posyandu x 100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase desa siaga aktif	%	Jumlah desa siaga aktif / Jumlah desa siaga yang dibentuk x 100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Realisasi APBDes	%	Realisasi APBDes / Total APBDes x 100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase Bumdes berkembang	%	Jumlah Bumdes Berkembang / Total Bumdes x 100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12	DINAS PERHUBUNGAN					
	Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Persentase angkutan barang dan penumpang yang layak fungsi	%	Jumlah angkutan barang dan penumpang yang layak fungsi / Jumlah keseluruhan angkutan barang dan penumpang x 100	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya layanan dan sarana perhubungan	Persentase uji KIR angkutan barang dan penumpang	%	Jumlah Uji KIR angkutan barang dan penumpang yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan / Total Jumlah Angkutan barang dan penumpang x 100	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
		Penyediaan fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan kabupaten	%	Jumlah fasilitas keselamatan jalan yang terpasang / Jumlah fasilitas keselamatan jalan yang direncanakan x 100	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
13	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN					
	Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian	Nilai Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	Rata-rata nilai 9 unsur penilaian survei kepuasan masyarakat pada pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Meningkatnya pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	Evaluasi tingkat kematangan Pelaksanaan SPBE (Permenpan no. 5/2018)	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Skor	Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Persentase Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam Satu Data	%	Jumlah PD yang terintegrasi dalam sistim satu data / Jumlah Total PD x 100	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Persentase aplikasi Perangkat Daerah yang menerapkan keamanan informasi	%	Jumlah aplikasi PD yang menerapkan keamanan informasi / Jumlah seluruh aplikasi PD x 100	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					
	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan industri terhadap PDRB	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB	%	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan besar dan eceran / jumlah PDRB x 100	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri pengolahan / jumlah PDRB x 100	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	Meningkatnya kontribusi dan daya saing peran koperasi UMKM, perindustrian dan perdagangan	Persentase koperasi aktif	%	Jumlah koperasi aktif / Jumlah seluruh koperasi x 100	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
		Presentase peningkatan jumlah usaha mikro menjadi kecil	%	Jumlah peningkatan Usaha Mikro menjadi Kecil Tahun n - Jumlah peningkatan Usaha Mikro menjadi Kecil Tahun n-1 / Jumlah peningkatan Usaha Mikro menjadi Kecil Tahun n-1 x 100	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase laju pertumbuhan sektor perdagangan	%	Jumlah laju pertumbuhan sektor perdagangan tahun n - Jumlah laju pertumbuhan sektor perdagangan tahun n-1 / Jumlah laju pertumbuhan sektor perdagangan tahun n-1 x 100	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase laju pertumbuhan sektor perindustrian	%	Jumlah Laju pertumbuhan sektor perindustrian tahun n - Jumlah laju pertumbuhan sektor perindustrian tahun n-1 / Jumlah laju pertumbuhan sektor perindustrian Tahun n-1 x 100	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
	Meningkatnya investasi daerah dan pelayanan terpadu satu pintu	Realisasi investasi daerah	Rupiah	Jumlah nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	Rata-rata nilai 9 unsur penilaian survei kepuasan masyarakat pada pelayanan terpadu satu pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya investasi di daerah	Persentase meningkatnya investasi berskala nasional	%	Jumlah investasi berskala nasional (PMDN/PMA) tahun n - Jumlah investasi berskala nasional (PMDN/PMA) tahun n-1 / Jumlah investasi berskala nasional (PMDN/PMA) tahun n-1 x 100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya pelayanan perijinan	Persentase Bangunan/ Usaha Berijin	%	Realisasi bangunan / usaha berijin dibagi Target bangunan / usaha berijin x 100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA					
	Meningkatnya pariwisata dalam perekonomian daerah	PDRB sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum	Rupiah	Jumlah PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya peran budaya dan pariwisata dalam perekonomian daerah	Jumlah kunjungan wisafawan	Orang	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Rata-rata lama tinggal	Hari	Jumlah hari dari rata-rata keseluruhan lama tinggal wisatawan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
	Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	Rata-rata nilai 9 unsur penilaian survei kepuasan masyarakat pada pelayanan perpustakaan dan kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	Mengukur nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan daerah	Persentase pengunjung perpustakaan	%	Jumlah pengunjung perpustakaan/ pengunjung perpustakaan yang ditargetkan x 100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase peningkatan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	Jumlah Koleksi buku di perpustakaan daerah pada tahun n-Jumlah Koleksi buku di perpustakaan daerah pada tahun n-1/Jumlah Koleksi buku di perpustakaan daerah pada tahun n-1 x100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase peningkatan koleksi judul buku yang tersedia perpustakaan daerah	%	Jumlah koleksi judul buku di perpustakaan daerah pada tahun n-Jumlah koleksi judul buku di perpustakaan daerah pada tahun n-1/Jumlah koleksi judul buku di perpustakaan daerah pada tahun n-1 x100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Meningkatnya tata kelola kearsipan pemerintah daerah	Persentase peningkatan arsip terpelihara dan dokumentasi kegiatan daerah	%	Jumlah arsip terpelihara dan dokumentasi tahun n-Jumlah arsip terpelihara dan dokumentasi tahun n-1/Jumlah arsip terpelihara dan dokumentasi tahun n-1x100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku / Jumlah perangkat daerah x 100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
18	DINAS PERIKANAN					
	Meningkatnya produksi perikanan	Persentase produksi perikanan meningkat	%	Jumlah produksi perikanan tahun n-Jumlah produksi perikanan tahun n-1/ Jumlah produksi perikanan tahun n-1 x100	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi perikanan laut	Ton	Jumlah produksi perikanan laut	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
		Produksi perikanan darat	Ton	Jumlah produksi perikanan darat	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
	Meningkatnya konsumsi ikan	Konsumsi ikan	Kg/kapita	Total konsumsi ikan / Jumlah penduduk	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
19	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN					
	Meningkatnya produksi pertanian dan perkebunan	Produksi sektor pertanian dan perkebunan	Ton	Jumlah produksi sektor pertanian dan perkebunan tahun n	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan	Produksi Padi	Ton	Jumlah produksi padi	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
		Produksi Jagung	Ton	Jumlah produksi jagung	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
		Produksi Sayur-Sayuran	Ton	Jumlah produksi sayur-sayuran	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
		Produksi Buah-Buahan	Ton	Jumlah produksi buah-buahan	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
		Produksi Tembakau	Ton	Jumlah produksi tembakau	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
		Produktivitas padi	Ton/Ha	Produksi tanaman padi (Ton) / Luas areal tanaman padi (Ha)	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
20	DINAS PETERNAKAN					
	Meningkatnya produksi peternakan	Persentase peningkatan produksi peternakan	%	Jumlah produksi peternakan tahun n-Jumlah Produksi peternakan tahun n-1/Jumlah Produksi peternakan tahun n-1	Dinas Peternakan	Dinas Peternakan
	Meningkatnya populasi ternak	Populasi Ternak Besar	Ekor	Jumlah populasi ternak besar tahun n	Dinas Peternakan	Dinas Peternakan
		Populasi Ternak Kecil	Ekor	Jumlah populasi ternak kecil tahun n	Dinas Peternakan	Dinas Peternakan
		Populasi Ternak Unggas	Ekor	Jumlah populasi ternak unggas tahun n	Dinas Peternakan	Dinas Peternakan

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
21	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum dan kesra	Persentase penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum dan kesra	%	Jumlah kegiatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum dan kesra / Jumlah kegiatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum dan kesra yang direncanakan x 100	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum dan kesra	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Kualitatif (ST/T/S/R)	Hasil penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Persentase pelaksanaan kegiatan kesra	%	Jumlah pelaksanaan kegiatan kesra/jumlah seluruh kegiatan kesra yang direncanakan x 100	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
22	BAGIAN HUKUM					
	Meningkatnya kualitas penerbitan produk hukum daerah	Persentase produk hukum daerah yang harmonis dan terpublikasi	%	Jumlah produk hukum daerah yang diharmonisasi/ diasistensi dan dipublikasi/Jumlah produk hukum daerah yang diprogramkan x 100	Bagian Hukum	Bagian Hukum
	Terwujudnya harmonisasi dan publikasi produk hukum daerah	Persentase produk hukum daerah yang diharmonisasi/diasistensi	%	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang diharmonisasi dan diasistensi/Jumlah produk hukum daerah yang diprogramkan x 100	Bagian Hukum	Bagian Hukum
		Presentase fasilitasi bantuan hukum untuk penanganan kasus perdata dan TUN pemerintah daerah	%	Jumlah fasilitasi bantuan hukum untuk penanganan kasus perdata dan TUN pemerintah daerah /Jumlah kasus yang dilaporkan x 100	Bagian Hukum	Bagian Hukum
		Persentase publikasi produk hukum daerah pada masyarakat dan aparatur pemerintah	%	Jumlah produk hukum yang dipublikasi / Jumlah produk hukum yang tersedia x 100	Bagian Hukum	Bagian Hukum

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
23	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					
	Meningkatnya pelayanan bidang administrasi pembangunan	Persentase capaian layanan bidang perekonomian dan administrasi pembangunan	%	Jumlah kegiatan bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang dilaksanakan/ Jumlah kegiatan yang direncanakan x100	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Bagian Perekonomian Administrasi Pembangunan
	Terwujudnya pelayanan bidang perekonomian dan administrasi pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan fisik keuangan tepat waktu	%	Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan realisasi fisik keuangan/ Jumlah seluruh Perangkat Daerah x 100	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Bagian Perekonomian Administrasi Pembangunan
		Persentase BUMD yang sehat	%	Jumlah BUMD yang sehat/ Jumlah total BUMD x 100	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
		Ketersediaan data potensi sumber daya alam	%	Jumlah PD yang menyampaikan data potensi sumber daya alam/ Jumlah perangkat daerah penyedia data x 100	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
24	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA					
	Terwujudnya tata kelola pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase pengadaan barang/ jasa melalui e-procurement	%	Total belanja e-procurement/ Total belanja pengadaan dalam APBD x 100	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
	Terwujudnya administrasi layanan pengadaan barang/jasa	Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa	%	Jumlah OPD yang difasilitasi dalam pengadaan barang/jasa dibagi jumlah seluruh OPD x100	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
		Persentase jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (JFPPBJ)	%	Jumlah JFPPBJ / Jumlah JFPPBJ sesuai analisis beban kerja x 100	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
25	BAGIAN ORGANISASI					
	Meningkatnya pelaksanaan kinerja organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan LKIP tepat waktu	%	Jumlah PD yang menyampaikan LKIP tepat waktu/ Jumlah seluruh Perangkat Daerah x 100	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi

4
9

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja	%	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja/Jumlah seluruh Perangkat Daerah x 100	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
	Meningkatnya kinerja dan kelembagaan PD yang efektif dan efisien	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki SOTK	%	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki SOTK/Jumlah seluruh Perangkat Daerah x 100	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Dokumen ABK dan ANJAB	%	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki Dokumen ABK dan ANJAB/Jumlah seluruh Perangkat Daerah x 100	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
	Meningkatnya ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki SOP	%	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki SOP/Jumlah seluruh Perangkat Daerah x 100	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
		Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	Rata-rata skor nilai indeks kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
26	BAGIAN UMUM					
	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/jumlah kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang direncanakan x 100	Bagian Umum	Bagian Umum
	Terwujudnya pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase kegiatan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi dengan baik sesuai dengan standar keprotokolan	%	Jumlah Kegiatan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi dengan baik sesuai dengan standar Keprotokolan/jumlah kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah x 100	Bagian Umum	Bagian Umum
27	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH					
	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga DPRD dalam rangka mendukung tugas, fungsi dan wewenang	Persentase fasilitasi kegiatan DPRD	%	Jumlah kegiatan DPRD yang difasilitasi/Jumlah kegiatan DPRD yang direncanakan x 100	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
	Terwujudnya pelayanan dalam rangka fasilitasi kegiatan DPRD	Persentase rancangan perda menjadi perda	%	Jumlah rancangan peraturan daerah yang ditetapkan/Jumlah rancangan peraturan daerah yang diusulkan x 100	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
		Persentase keputusan DPRD yang dihasilkan	%	Jumlah keputusan DPRD yang ditetapkan/Jumlah keputusan DPRD yang direncanakan x 100	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
		Persentase rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang dihasilkan	%	Jumlah rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang ditetapkan/Jumlah rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang direncanakan x 100	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
28	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP	Poin	Nilai komponen Perencanaan Kinerja pada evaluasi SAKIP	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Indeks Inovasi Daerah	Skor	Himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Terwujudnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	%	Persentase hasil konsistensi dan penyelarasan perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Penerapan kelitbangan untuk pembangunan daerah	Persentase implementasi hasil kelitbangan	%	Jumlah implementasi hasil kelitbangan / Jumlah rencana kelitbangan yang direncanakan x 100	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
29	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Predikat	Penilaian Kemendagri	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah	Penetapan APBD	Tepat Waktu / Tidak Tepat Waktu	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
		Persentase Pengelolaan Aset Daerah	%	Aset yang ditangani / Total aset x 100	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase SILPA terhadap APBD	%	Total Silpa / Total APBD x 100	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
30	BADAN PENDAPATAN DAERAH					
	Meningkatnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Realisasi PAD	%	Realisasi PAD/Target PAD x 100	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
	Meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	Total PAD/Total Pendapatan x 100	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH					
	Meningkatnya Sumber Daya Manusia dan disiplin Aparatur Sipil Negara	Persentase cakupan pemenuhan jabatan pada perangkat daerah	%	Jumlah seluruh jabatan yang terisi pada perangkat daerah / Total seluruh jabatan yang direncanakan pada semua perangkat daerah x 100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
		Persentase tingkat disiplin ASN	%	Jumlah ASN yang tidak melanggar disiplin / Jumlah total ASN x 100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas instansi pemerintah	Persentase jabatan pimpinan tinggi pratama yang terisi pada perangkat daerah	%	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pratama yang terisi / Total seluruh perangkat daerah x 100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
		Persentase jabatan administrator dan pengawas yang terisi pada perangkat daerah	%	Jumlah jabatan administrator dan pengawas yang terisi / Total jabatan administrator dan pengawas seluruh perangkat daerah x 100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
		Persentase jabatan fungsional tertentu yang terisi pada perangkat daerah	%	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu yang terisi/ Total jabatan fungsional tertentu yang direncanakan x 100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah

4
g

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal / jumlah ASN yang direncanakan x 100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
		Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	Jumlah ASN yang mengikuti diklat struktural / Total diklat struktural yang direncanakan bagi ASN x100	Badan Kepegawaian, Pendidikan, Pelatihan dan Sumberdaya Manusia Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan, Pelatihan dan Sumberdaya Manusia Daerah
32	INSPEKTORAT					
	Meningkatnya efektifitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah Temuan BPK	Temuan	Jumlah temuan BPK RI atas LKPD tahun n-1	Inspektorat	Inspektorat
		Persentase Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	%	Jumlah Dokumen SAKIP PD yang dievaluasi / Jumlah PD x 100	Inspektorat	Inspektorat
		Level Maturitas SPIP	Level	Penilaian yang dikeluarkan oleh BPKP	Inspektorat	Inspektorat
	Meningkatnya kuantitas dan kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level	Penilaian yang dikeluarkan oleh BPKP	Inspektorat	Inspektorat
		Persentase Aparatur Pemeriksa (Auditor dan P2UPD) yang Profesional	%	Jumlah ASN yang memiliki sertifikat Auditor dan P2UPD / Jumlah ASN yang direncanakan x 100	Inspektorat	Inspektorat
	Meningkatnya Penyelesaian Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Persentase TLHP APIP	%	Realisasi rekomendasi APIP yang telah ditindaklanjuti / jumlah total rekomendasi temuan APIP x 100	Inspektorat	Inspektorat
		Persentase TLHP BPK	%	Realisasi rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti / jumlah total rekomendasi temuan BPK x 100	Inspektorat	Inspektorat
33	KECAMATAN LOBALAIN					
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	Rata-rata nilai 9 unsur penilaian survei kepuasan masyarakat di Kecamatan Lobalain	Kecamatan Lobalain	Kecamatan Lobalain

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat / Jumlah pengaduan masyarakat x 100	Kecamatan Lobalain	Kecamatan Lobalain
		Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	%	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa / Total desa yang ada di kecamatan	Kecamatan Lobalain	Kecamatan Lobalain
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif / Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Ada di Kecamatan x100	Kecamatan Lobalain	Kecamatan Lobalain
34	KECAMATAN ROTE BARAT LAUT					
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	Rata-rata nilai 9 unsur penilaian survei kepuasan masyarakat di Kecamatan Rote Barat Laut	Kecamatan Rote Barat Laut	Kecamatan Rote Barat Laut
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat / Jumlah pengaduan masyarakat x 100	Kecamatan Rote Barat Laut	Kecamatan Rote Barat Laut
		Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	%	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa / Total desa yang ada di kecamatan	Kecamatan Rote Barat Laut	Kecamatan Rote Barat Laut
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif / Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Ada di Kecamatan x100	Kecamatan Rote Barat Laut	Kecamatan Rote Barat Laut
35	KECAMATAN ROTE BARAT DAYA					
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	Rata-rata nilai 9 unsur penilaian survei kepuasan masyarakat di Kecamatan Rote Barat Daya	Kecamatan Rote Barat Daya	Kecamatan Rote Barat Daya
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat / Jumlah pengaduan masyarakat x 100	Kecamatan Rote Barat Daya	Kecamatan Rote Barat Daya

9

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
		Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	%	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa/ Total desa yang ada di kecamatan	Kecamatan Rote Barat Daya	Kecamatan Rote Barat Daya
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif / Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Ada di Kecamatan x100	Kecamatan Rote Barat Daya	Kecamatan Rote Barat Daya
36	KECAMATAN ROTE BARAT					
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	Rata-rata nilai 9 unsur penilaian survei kepuasan masyarakat di Kecamatan Rote Barat	Kecamatan Rote Barat	Kecamatan Rote Barat
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat / Jumlah pengaduan masyarakat x 100	Kecamatan Rote Barat	Kecamatan Rote Barat
		Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	%	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa/ Total desa yang ada di kecamatan	Kecamatan Rote Barat	Kecamatan Rote Barat
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif / Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Ada di Kecamatan x100	Kecamatan Rote Barat	Kecamatan Rote Barat
37	KECAMATAN ROTE SELATAN					
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	Rata-rata nilai 9 unsur penilaian survei kepuasan masyarakat di Kecamatan Rote Selatan	Kecamatan Rote Selatan	Kecamatan Rote Selatan
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat / Jumlah pengaduan masyarakat x 100	Kecamatan Rote Selatan	Kecamatan Rote Selatan
		Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	%	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa/ Total desa yang ada di kecamatan	Kecamatan Rote Selatan	Kecamatan Rote Selatan
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif / Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Ada di Kecamatan x100	Kecamatan Rote Selatan	Kecamatan Rote Selatan
38	KECAMATAN ROTE TENGAH					
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	Rata-rata nilai 9 unsur penilaian survei kepuasan masyarakat di Kecamatan Rote Tengah	Kecamatan Rote Tengah	Kecamatan Rote Tengah
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat / Jumlah pengaduan masyarakat x 100	Kecamatan Rote Tengah	Kecamatan Rote Tengah
		Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	%	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa/ Total desa yang ada di kecamatan	Kecamatan Rote Tengah	Kecamatan Rote Tengah

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif / Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Ada di Kecamatan x100	Kecamatan Rote Tengah	Kecamatan Rote Tengah
39	KECAMATAN PANTAI BARU					
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	Rata-rata nilai 9 unsur penilaian survei kepuasan masyarakat di Kecamatan Pantai Baru	Kecamatan Pantai Baru	Kecamatan Pantai Baru
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat / Jumlah pengaduan masyarakat x 100	Kecamatan Pantai Baru	Kecamatan Pantai Baru
		Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	%	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa/ Total desa yang ada di kecamatan	Kecamatan Pantai Baru	Kecamatan Pantai Baru
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif / Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Ada di Kecamatan x100	Kecamatan Pantai Baru	Kecamatan Pantai Baru
40	KECAMATAN ROTE TIMUR					
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	Rata-rata nilai 9 unsur penilaian survei kepuasan masyarakat di Kecamatan Rote Timur	Kecamatan Rote Timur	Kecamatan Rote Timur
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat / Jumlah pengaduan masyarakat x 100	Kecamatan Rote Timur	Kecamatan Rote Timur
		Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	%	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa/ Total desa yang ada di kecamatan	Kecamatan Rote Timur	Kecamatan Rote Timur
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif / Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Ada di Kecamatan x100	Kecamatan Rote Timur	Kecamatan Rote Timur
41	KECAMATAN NDAO NUSE					
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	Rata-rata nilai 9 unsur penilaian survei kepuasan masyarakat di Kecamatan Ndao Nuse	Kecamatan Ndao Nuse	Kecamatan Ndao Nuse
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat / Jumlah pengaduan masyarakat x 100	Kecamatan Ndao Nuse	Kecamatan Ndao Nuse

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
		Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	%	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa/ Total desa yang ada di kecamatan	Kecamatan Ndao Nuse	Kecamatan Ndao Nuse
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif / Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Ada di Kecamatan x100	Kecamatan Ndao Nuse	Kecamatan Ndao Nuse
42	KECAMATAN LANDULEKO					
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	Rata-rata nilai 9 unsur penilaian survei kepuasan masyarakat Kecamatan Landuleko	Kecamatan Landu Leko	Kecamatan Landu Leko
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat / Jumlah pengaduan masyarakat x 100	Kecamatan Landu Leko	Kecamatan Landu Leko
		Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	%	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa/ Total desa yang ada di kecamatan	Kecamatan Landu Leko	Kecamatan Landu Leko
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif / Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Ada di Kecamatan x100	Kecamatan Landuleko	Kecamatan Landu Leko
43	KECAMATAN LOAHOLU					
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	Rata-rata nilai 9 unsur penilaian survei kepuasan masyarakat Kecamatan Loaholu	Kecamatan Loaholu	Kecamatan Loaholu
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat / Jumlah pengaduan masyarakat x 100	Kecamatan Loaholu	Kecamatan Loaholu
		Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	%	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa/ Total desa yang ada di kecamatan	Kecamatan Loaholu	Kecamatan Loaholu
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif / Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Ada di Kecamatan x100	Kecamatan Loaholu	Kecamatan Loaholu

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
44	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
	Meningkatnya Kualitas Kinerja pembinaan politik, kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini	Persentase layanan pembinaan politik, kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini	%	Jumlah kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan / Jumlah Kegiatan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang direncanakan x 100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Terwujudnya pembinaan politik, kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini	Cakupan pembinaan ideologi wawasan kebangsaan	%	Jumlah kegiatan pembinaan ideologi wawasan kebangsaan yang dilaksanakan / Jumlah kegiatan pembinaan ideologi wawasan kebangsaan yang direncanakan x 100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase Ormas/LSM yang dibina	%	Jumlah ormas atau LSM yang dibina / Total ormas atau LSM x 100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase partai politik yang diverifikasi	%	Jumlah partai politik yang diverifikasi / Jumlah seluruh partai politik x 100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Cakupan pembinaan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi	%	Jumlah kegiatan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi yang dilaksanakan / Jumlah kegiatan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi yang direncanakan x 100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

